



# **RANCANGAN RKPD DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

**Disampaikan Dalam Rangka  
MUSRENBANG FORUM SKPD 2018  
Yogyakarta, 31 Maret 2017**

# KONTRIBUSI FORUM TEMATIK

*Tema RKP  
Nasional 2018*

Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur  
untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

*Tema RKPD 2018*

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan  
Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi  
dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan

Arah Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemerintahan

Strategi Perencanaan Pembangunan

Penanggulangan  
Kemiskinan

Meningkatkan  
Pertumbuhan  
Ekonomi

Mengurangi  
ketimpangan  
Wilayah

Tindak Lanjut  
Pembangunan NYIA  
(Bandara Baru)

Meningkatkan  
Layanan  
Pertanahan

Pengelolaan  
dan pemanfaatan  
tanah SG,  
PAG, TKD

Penanganan  
permasalahan  
pertanahan, perdes,  
ijin pemanfaatan  
tanah desa,  
penetapan lokasi

Koridor  
Ekonomi  
Strategis

Penataan  
Kawasan

Dukungan  
Percepatan  
Penyusunan  
Rencana Rinci  
Tata Ruang

Dukungan  
Terhadap  
Wilayah  
Strategis  
dan Cepat  
Tumbuh

Dukungan  
Penyusunan  
Rencana Tata Ruang

Meningkatkan  
kesesuaian  
Tata Ruang

Pelestarian  
Lingkungan  
dalam  
Pembangunan

Dukungan  
Sarpras  
dasar

Infrastruktur  
Pendukung

Pengembangan  
Destinasi  
Wisata

Pengendalian  
Pemanfaatan  
Ruang

Percepatan  
Penyusunan  
Rencana Rinci  
Tata Ruang

Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian

# ISU DAN KONSEP STRATEGIS PERTANAHAN

## ISU STRATEGIS PERTANAHAN

Kurangnya pemahaman tata cara pengurusan izin pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.

Lemahnya validitas data tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang secara fisik belum teridentifikasi secara jelas di lapangan.

Masih banyaknya permasalahan dan sengketa di bidang pertanahan termasuk permasalahan Tanah Desa.

Masih banyaknya desa yang belum mempunyai perdes pemanfaatan Tanah Desa.

Banyaknya dokumen pertanahan yang rusak.



## KONSEP STRATEGIS

Sosialisasi tata cara pengurusan izin pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.

1. Inventarisasi dan identifikasi terkait luas secara komprehensif
2. penyempurnaan dan update berkala database pertanahan berbasis WEB GIS

Penanganan permasalahan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi penyusunan perdes tentang pemanfaatan Tanah Desa sebagai dasar dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Desa.

Fasilitasi perawatan dokumen pertanahan yang bekerja sama dengan ANRI.



# ISU DAN KONSEP STRATEGIS PENATAAN RUANG

## ISU STRATEGIS TATA RUANG

### Perwujudan Sistem Prasarana Utama

Perwujudan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport ( NYIA )

### Rencana Rinci Tata Ruang

Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang dalam perencanaan pembangunan

### Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Ancaman terhadap alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis di kawasan sekitar NYIA dan kawasan tumbuh cepat.
2. Belum adanya instrumen pengendalian yang ditetapkan salah satunya peraturan mengenai insentif dan disinsentif.
3. Hasil audit pemanfaatan ruang di DIY menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang 69,81% ditinjau dari pola dan struktur ruang

### Ketimpangan Wilayah

1. Perkembangan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali
2. Internal antara Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul

## KONSEP STRATEGIS

1. Percepatan legalitas dokumen rencana rinci tata ruang pansela dan temon –prambanan untuk mendukung fungsi PKWp
2. Mendorong kabupaten Kulon progo untuk menetapkan RDTR kawasan NYIA

1. Percepatan legalitas dokumen rencana rinci tata ruang Kabupaten
2. Mengintensifkan pembinaan dan sosialisasi dokumen rencana tata ruang pada sektor terkait dan masyarakat
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang

1. Memperkuat dasar penentuan lahan pertanian dan kajian dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Percepatan penetapan instrumen pengendalian sebagai alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya peraturan mengenai insentif dan disinsentif.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Mendukung pembangunan koridor Tempel-Parangtritis, koridor Temon-Prambanan dan pengembangan Kawasan Pantai Selatan.
2. Pembangunan infrastruktur penghubung Desa – Kota.
3. Mendukung pengembangan strategis perbatasan provinsi (Yogya–Solo-Semarang dan Yogya–Prigi–Blitar)

# KEBUTUHAN LINTAS SEKTOR INSTANSI LAIN

---

- Kerja sama dengan BPN;
- Kerjasama dengan BIG untuk memperoleh rekomendasi teknis peta RTR;
- Kerja sama dengan Satpol PP dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- Dukungan penelusuran arsip dari BPAD dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- Kerjasama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Urusan Tata Ruang terdapat 10 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 3 Program, 24 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 1.188.284.512.000,-
  2. Urusan Pertanahan terdapat 5 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 1 Program, 11 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 45.110.000.000,00

A graphic consisting of a central black rectangle with the word "TERIMAKASIH" in white, flanked by two red rectangles on either side.

**TERIMAKASIH**